

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Agency*

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko.

Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/APBD, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.3. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Wiley (2002) Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari

organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan

laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN (Indriasari, 2008).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi computer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan computer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan.

2.5 Pengendalian Intern Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011), Pengendalian Intern merupakan metode dan pengukuran yang diadopsi untuk:

1. Menjaga keamanan aset.
2. Meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi operasi, dan
4. Menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove et al., 1990 dalam Triyuwono dan Roekhudin, 2000).

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2001). Pengendalian intern administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Personel yang kompeten
- b. Pelimpahan tanggung jawab
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

2.6 Keandalan Laporan Keuangan

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Menurut PP 71 tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (variability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.7. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Informasi yang tepat waktu (*timeliness*) menunjukkan pada rentang waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi (Chenhall dan Morris, 1986). Jadi informasi yang tepat waktu dalam penelitian ini dikonseptualkan menjadi dua subdimensi yaitu kecepatan membuat laporan dan frekuensi pelaporan. Kecepatan diartikan sebagai tenggang waktu antara kebutuhan akan informasi dengan tersedianya informasi, sedangkan frekuensi diartikan dengan seberapa sering informasi disediakan untuk para pemakai laporan informasi akuntansi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Indriasari (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda Kota Palembang dan Kota Ogan Hilir. Hasil penelitian membuktikan bahwa teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sementara sumberdaya manusia tidak berpengaruh. Kemudian sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Zetra (2009), melakukan penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada 10 SKPD di pemerintahan daerah Sumatera barat. Penelitian membuktikan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap nilai informasi.

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) terhadap Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN, membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapasitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Andriani (2010), meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya

manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, tapi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh baik terhadap keandalan maupun ketepatan waktu laporan keuangan pemda.

Hasil penelitian Rosalin (2011) terhadap 102 staf pelaporan keuangan BLU di Kota Semarang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil analisis Mustafa, dkk (2011) terhadap 77 SKPD di Kota Kendari menunjukkan kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Arfianti (2011) terhadap 110 kepala dan staf bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Berikut disajikan tabel ringkasan hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Variabel	Hasil
1.	Indriasari (2008) Di Pemda Kota Palembang dan Kota Ogan Hilir	kapasitas sumber daya manusia(X1), Pemanfaatan teknologi informasi(X2), Pengendalian intern akuntansi (X3), Nilai informasi pelaporan keuangan (Y)	Teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, SDM tidak berpengaruh. SDM dan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
2.	Zetra(2009)di SKPD Pemda Sumbar	SDM (X1) teknologi (X2) nilai informasi pelaporan keuangan (Y)	Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
3.	Widyaningrum & Rahmawati (2010) Di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWO NOSRATEN,	Kapasitas sumber daya manusia(X1), Pemanfaatan teknologi informasi(X2), Pengendalian intern akuntansi (X3), Keandalan dan Ketepatan waktu lap keu (Y)	Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi, SDM tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4.	Andriani (2010) Di Pemda Kabupaten Pesisir Selatan	Kapasitas sumber daya manusia(X1), Pemanfaatan teknologi informasi(X2), Keandalan dan Ketepatan waktu lap keu(Y)	kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan dan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Teknologi informasi berpengaruh baik terhadap keandalan maupun ketepatan waktu laporan keuangan.
	Rosalin (2011) BLU di Di BLU Kota Semarang	Pemanfaatan Teknologi informasi (X1), Pengendalian intern akuntansi (X2) dan komitmen organisasi (X3) serta Keandalan lap keu (Y)	Teknologi, pengendalian intern, & komitmen berpengaruh terhadap keandalan, kualitas SDM tidak. Teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap <i>timeliness</i> , kualitas SDM dan pengendalian intern tidak berpengaruh.
6.	Mustafa, dkk (2011) Di Pemda Kendari	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi informasi (variabel exogenus) serta Keterandalan dan Ketepatan waktu laporan keuangan (variabel endogen)	kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi berpengaruh. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, kapasitas SDM dan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
7.	Arfianti (2011) Di Pemda Kabupaten Batang	Kapasitas sumber daya manusia(X1), Pemanfaatan teknologi informasi(X2), Pengendalian intern akuntansi (X3), Keandalan dan Ketepatan waktu lap keu (Y)	SPI berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan, kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Kualitas SDM dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh SDM Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Melalui Pengendalian Internal Akuntansi

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Permendagri 13 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran. Perubahan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Penelitian Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005), menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah XYZ, Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Widyaningrum dan Rahmawati (2010) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemda melalui pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda melalui pengendalian intern akuntansi

2.9.2. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Melalui Pengendalian Internal Akuntansi

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).

Dalam Penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Mustafa, 2011).

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemda (Indriasari, 2008; Widyaningrum & Rahmawati, 2010; Andriani, 2010; Rosalin, 2011). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda melalui pengendalian internal akuntansi

2.9.3. Pengaruh SDM Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan.

Beberapa hasil penelitian seperti Indriasari (2008), Zetra (2009), Arfianti (2011) dan Mustafa, dkk (2011) membuktikan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengajukan hipotesis:

H3: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemda

2.9.4. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Penelitian Cohen *et al.* (2007) menemukan bahwa teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.

Beberapa hasil penelitian seperti Indriasari (2008), Zetra (2009), Rosalin (2011) dan Arfianti (2011) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat pengaruh antara teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H4: Teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemda.

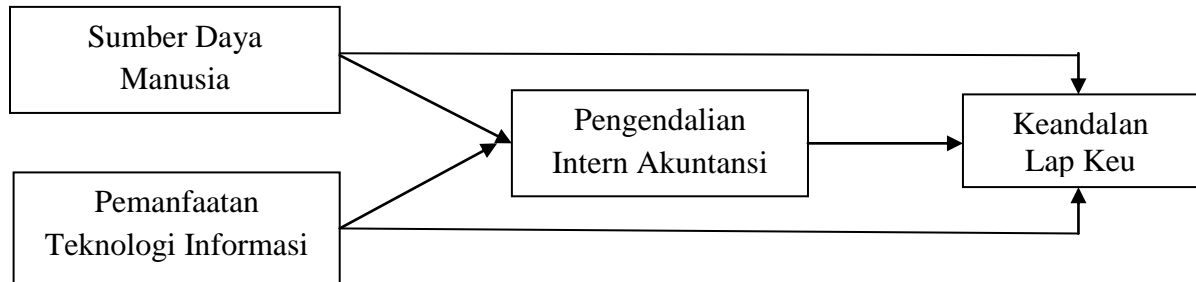
2.10 Model Penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka model penelitiannya adalah:

a. Model Pertama

Gambar 2.4.1

Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi dan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



b. Model kedua

Gambar 2.4.2

Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

